PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Survey Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang)

Irvan Saefulloh

Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Abstract

Local governments now confronted by demands a lot of both from increased financial sietem regional and optimal performance in terms of the demands that society wants. The purpose of the study was to determine the impact of participation in budgeting and financial systems of the region on the performance of the Government in the service of service in the area of subang. The methods used in this research is descriptive method and verifikatif.

The Unit of analysis in this study is the Head Office of subang Regency Government totaling 30 people as the population, and the rest of the sample population using census techniques. To determine the impact of participation in the preparation of the budget and the financial system on the performance of local governments, using statistical tests. Statistical tests used in this study is to test the correlation analysis, multiple regression analysis, linear coefficients of determination and hypothesis testing using IBM SPSS assisted Statistics 20 applications.

The results of this study indicate that the participation of the budget provide a strong influence on the performance of the Government in The area of Subang, as well as regional financial system that gives a strong influence on the performance of local government in the service of the Government Kabuapten Subang.

Keywsord: The participation of the preparation of the budget, the financial accounting system, the performance of local government.

I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi ekternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntanbilitas kinerja dan peningkatan pelayanan public (Abdul Halim 2007:117). Pelaksanaan otonomi daerah secara normatif ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Abdul Halim 2007:140). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui wadah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai dengan tinggkat kabupaten subang (Abdul Halim 2007:117). Pemerintah mengeluarkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional kemudian juga undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang pada intinya menitikberatkan pada upaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses assessment kebutuhan dan perumusan rencana dasar pembangunan di mana hasilnya kemudian menjadi skala prioritas dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pelaksanaan pembangunan serta pengawasannya (Abdul Halim 2007:130). Menyadari akan tangung jawab yang dibebankan oleh pemerintah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dalam upaya

berkewajiban merumuskannya dalam suatu wujud: visi, misi dan tujuan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk perencanaan maupun penganggarannya, Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerana berkaitan dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya masih menurut (Abdul Halim 2007). Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran (Abdul Halim 2007:118). partisipasi penyusunan anggaran pengaruh masih rendahnya setelah pencapaian target anggaran, belum baik dikarenakan masih adanya kesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran pencpaian belum tepat dengan sasaran dan rencana yang ditetapkan keruagian daerah yang mengakibatkan kerugian daerah adalah diakibatkan oleh belum terlaksananya penyusunan atau rencana anggaran serta pertangguangjawaban dari aparat pemerintah daerah sehingga masih terdapat kesalahan dalam laporan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah di pemerintah kabaupaten subang (Yayah Handani :2011). Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercemin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas (Maryana ;2011). Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1.Pengembangan sistem pembukuan berganda (Double entry), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.

2.akrual (accrual basis) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan (Maryana ;2011).

sistem akuntansi keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, Terutama dalam proses pencatatannya yaitu kurang baiknya laporan keuangan atau anggaran pemerintah daerah (LKPD) dilihat dari hasil pemeriksaan, bisa menjadi indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2007 saja, dari 24 Laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota yang diperiksa, tujuh diantaranya mendapat opini disclaimer (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari, 2009). target dan tujuan yang telah direncanakan (Maryana :2011).

Kinerja pemerintah daerah pencapaian dalam semua pembangunan yang dilakukan secara efisien cukup sesuai target yang di harapkan yang telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten subang dari perencanaan target yang dianggarkan untuk pembangunan tetapi anggaran yang cukup terealisasi atau, atau dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Manajemen Pemda, dituntut untuk membangun instrumen informasi keuangan daerah yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan daerah tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen Pemda, melainkan juga memenuhi keperluan pihak di luar Pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. (Rohman Abdul : 2007) Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Penilaian kinerja didasarkan pada value for money dan efektifitas anggaran dalam pendekatan ini cendrung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerinah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (over spending) masih menurut (Mardiasmo 2009;84). Menurur pendekatan anggaran kinerja, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efesien, selain didorong untuk menggunakan dana

secara ekonomis, pemerintah juga dituntut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh karena itu agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja (Mardiasmo 2009;84).

1.2 Rumusan Masalah

Beerdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahn sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Subang .
2. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
3. Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
4. Seberapa jauh pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintahan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
5. Seberapa jauh pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
6. Seberapa jauh pengarunya partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhdap kinerja pemerintah daerah.

1.3 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang tekait dengan partisipasi penyusunan anggaran dan Sistem Akuntansi keuangan daerah tergadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pelaksanaan partisipasi penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Subang.
2. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
4. Seberapa besar pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Sebarapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
6. Seberapa besar pangaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhdap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis
   Penulis berharap setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pihak yang memerlukan.
2. Bagi Pemerintah
   Memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah, agar dapat mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik dan sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan Pemerintahan.
3. Bagi Karyawan atau aparatur Pemerintah
   Memberikan masukan dan manfaat bagi pencapaian kineja pemerintah daerah agar menjadi lebih baik.

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi
   Memberikan informasi tentang keterkaitan antara partisipasi penyusunan nggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang Akuntansi sector Publik yaitu Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Brownell dalam Sumarno (2005:586) menerangkan partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Sementara Brownell dalam Ikhsan (2007:174) menyatakan bahwa partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan. Komitmen dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama. Menurut Wartono dalam Oka Lestariani Widiya (2006:29) mendefinisikan partipasi anggaran adalah sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Partisipasi yang tinggi dalam proses pembuatan anggaran akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada bawahan untuk melakukan *slack* dan sebaliknya ketika partisipasi rendah harapan bawahan untuk melakukan *slack* anggaran dibatasi sehingga *slack* anggaran juga rendah.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat (1), bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah :"Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan,penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan sertapelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakansesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, dan yangdilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi" Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yangditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi.

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah adalah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Wawan et al (2009) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah Bagaimana atau sejauh mana Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan-urusannya tersebut.

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis *(strategic planning)* suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam dalam periode tertentu.(Abdul Rohman, 2009).

Mardiamo (2009;128) juga mengatakan peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :

1. "Unruk membantu memperjelas tujuan organisasi.
2. Untuk mengevaluasi target akhir *(final outcome)* yang dihasilkan.
3. Untuk menunjukan standar kinerja.
4. Untuk menunjukan efektifitas.
5. Untuk membentu menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran".

2.2 Kerangka Pemikiran

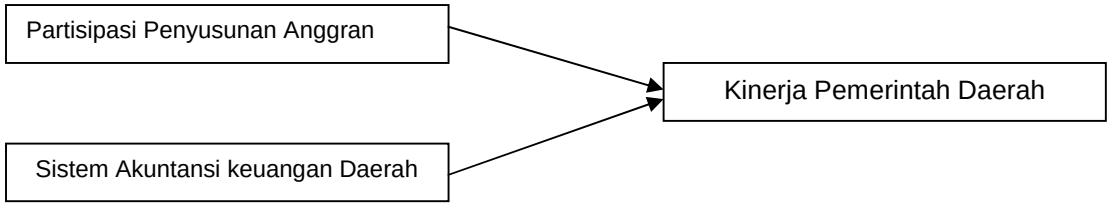
1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Menurut Ida Bagus Agung (2010:19) partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial menjelaskan Partisipasi akan menguntungkan suatu organisasi perusahaan. Partisipasi telah menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawan, meningkatkan kerja sama diantara manajer. Menurut *Hansen dan Mowen* Partisipasi penyusunan anggaran memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran. Peningkatan tanggung jawab dan tantangan yang intern dalam proses tersebut memberikan insentif non uang yang mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi.Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada pihak yang melaksanakannya dalam suatu Pemerintah dalam hal ini SKPD di Kota Bandung. Deddi dan Ayuningtyas 2011 mengatakan pendekatan kinerja diperkenakan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam penyusunan anggaran, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

2. Sistem Akuntansi Keunagan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Eko Hariyanto (2007:10) menyatakan bahwa:“Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. System akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi”. Sedangkan Masisi (1978), Gylnn (1993) dalam Mardiasmo (2002:147-148) menyatakan bahwa: “Aturan dasar system akuntansi keuangan daerah sebagai berikut: Identifikasi, Pengklasifikasian, Adanya system pengendalian untuk menjamin reliabilitas, Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Pencatatan dan pelaporan diperlukan untuk memenuhi 3 kebutuhan yaitu: legal, managerial, dan stewardship”. Selain itu Menurut Mardiasmo (2002 : 147) menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma Penelitian seperti pada gambar 2.4.



Gambar 2.1 Paradigma penelitian

2.3 Hipotesis

Penulis mengasumsikan dalam pengambil keputusan sementara (hipotesis) bahwa sebagai berikut :

H1 :Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Subang sudah mengikut sertakan para pegawai Pemerintahan Daerah.

H2 :Sistem Akuntansi keuangan daerah Pada Pemerintahan daerah Kabupaten Subang sudah baik.

H3 : Kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang sudah pada pencapaian kinerja yang tinggi.

H4 : Partiispasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.

H5 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.

H6 : Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.

III. Objek Dan Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih teratur dan sistematis. Dengan membuat desain penelitian, penyusunan sebuah karya tulis pun akan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Desain penelitian menurut Husein Umar adalah sebagai berikut : "Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian" Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya tulis dapat terselesaikan secara cepat dan baik. Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sugiono terdapat enam aspek utama didalam proses penelitian yaitu:

"1. Rumusan tasalah
2. Landasan Teori
3. Perumusan hipotesis
4. Pengumpulan data
5. Analisis data
6. Kesimpulan dan saran."

Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, dengan pertanyaan ini maka akan dapat membantu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Partisipasi penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Subang
2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten subang.
3. Bagaimana pelaksanaan Kinerja Pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang
4. Bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daeah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
6. Bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah penelitian tersebut. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat bukan sekedar perbuatan coba – coba. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Karena itu dalam penelitian ini, penulis memasukkan teori – teori yang berhubungan dengan judul yang diambil.

Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang"

3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen partisipasi penyusunan anggaran dan system akuntansi keuangan daerah serta variabel dependen Kinerja pemerintah Daerah Adapun tabel operasionalisasi sesuai dengan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel, Konsep Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No Kuesioner
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1)	Partisipasi penyusunan anggaran Tingkat seberapa jauh	1. Keterlibatan 2. Pengaruh 3. Komitmen		

	keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan M. Nafarin (2007:11)	(Brownell dalam Falikhatun 2007)	Ordinal	1-13
Sitem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Mendagri No. 29 Tahun 2002)	1. Pencatatan 2.Penggolongan dan Pengikhtisaran 3. Pelaporan (Mendagri No. 29 Tahun 2002) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002	Ordinal	14-21

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu. Abdul Rohman (2007)	Peran indikator kinerja : 1. Memperjelas tujuan organisasi. 2. Menunjukan standar kinerja. 3. Menunjukan efektifitas. 4. Mengevaluasi target akhir. 5. Menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling untuk mencapai sasaran. Mardiasmo (2009;128)	Ordinal	22-31

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. *Field Reseach* (Penelitian Secara Langsung)
   a. Observasi, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah.
   b. Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah inspektorat dan Kepala Dinas PEMDA Kabupaten Subang. Dengan harapan mereka bisa memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
   c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan Kepala Sub Bagian Umum Inspektorat Kabupaten Subang , juga beberapa kepala Pemerintah daerah / Kepala Sub Bagian Umum, dan pihak – pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
   d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen – dokumen yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Subang, LHP 2011, peraturan pemerintah, buku – buku yang ada.
2. *Library Reseach* (Studi Pustaka)

   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan , website dan penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Teknik Penarikan Sempel

Pengumpulan dan penyajian data mengemukakan bahwa pengertian dasar dari :

1. Populasi adalah seluruh obyek yang ingin kita ketahui besaran karakteristiknya.
2. Sampel adalah sebagian obyek populasi yang mewakili karakteristik populasinya, dan kemudian diteliti.
3. Hasil penelitian atas sampel kemudian digeneralisasi bagi keseluruhan populasi. Maka sampel harus representatif (bersifat mewakili populasi).

1. Populasi

Menurut Umi Narimawati (2008:72), populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa menusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebaginya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono; 2009:80).

Berdasarkan definisi di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pegawai di Dinas Pemerintah Kabupaten Subang yang dapat dimintai keterangan mengenai anggaran berjumlah 30 orang. Dengan demikian populasi berjumlah 30 orang pegawai Dinas Pemerintah Kabupaten Subang dengan rincian 10 orang Bagian Anggaran, 10 orang Bagian Akuntansi dan 10 orang Kebendaraan.

2. Sampel

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2008:73), sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi unit pengamatan sebuah penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2009:81). Sampel pada Pemerintah Kabupaten Subang menggunakan *sampling* jenuh. Menurut Sugiyono (2010:122) *sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila jumlah populasi relatif kecil. Kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus. Dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan populasi yang didapat maka sample yang dipilih 30 orang pegawai yang dapat dimintai keterangan mengenai anggaran di Dinas Pemerintah Kabupaten Subang, dengan rincian 10 orang Bagian Anggaran, 10 orang Bagian Akuntansi dan 10 orang Bagian Kebendahaan.

3.5 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_o) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen (Y).

Hipotesis penelitian ini dapat diterjemahkan dalam hipetesis statistik sebagai berikut :

H1 :Para pegawai sudah turut berpatisipasi dalam penyusunan anggaran pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang Dimana :

H_{01}:ρ(PA) ≤ 68%, Para pegawai belum turut berpatisipasi dalam penyusunan anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Subang.

H_{11}:ρ(PA) > 68%, Para pegawai sudah turut berpatisipasi dalam penyusunan anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Subang.

H2 :Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang sudah baik

H_{01}:ρ(PI) ≤ 68%, Sistem Akuntansi Keuangan daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

H_{11}:ρ(PI) > 68%, Sistem akuntansi keuangan daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang sudah baik.

H3 : Pelaksanaan kinerja pada pemerintahan Kabupaten Subang berorientasi pada pencapaian kinerja yang tinggi.

H_{01}:ρ(KP) ≤ 68%, Pelaksanaan kinerja pemerintahan Kabupaten Subang masih dalam pencapaian kinerja yang rendah.

H_{11}:ρ(KP) > 68%, Pelaksanaan kinerja pemerintahan Kabupaten Subang sudah mencapai pada pencapaian kinerja yang tinggi.

Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila nilai koefisien regresi berganda tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien arah garis sama dengan nol maka Ho diterima.

IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Berdasarkan Presntasi Skor Jawaban responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 1548 berada di antara interval 1326 – 1638. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Subang berada dalam kategori baik. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa keterlibatan, pengaruh dan komitmen sudah baik. Menurut Brownell dalam Ikhsan (2007:174) menyatakan bahwa partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam partisipasi penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sudah baik sangat dibutuhkan. Keterlibatan, pengaruh, dan komitmen dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama.

4.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Presntasi Skor Jawaban responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 945 berada di antara interval 816 – 1008. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang berada dalam kategori baik. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa pencatatan, penggolongan dan pengiktiaran serta pelaporan sudah baik. Menurut Eko Hariyanto (2007:10) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Serangkaian secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen sudah baik lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

4.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Presntasi Skor Jawaban responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel sistem kinerja daerah sebesar 1028 berada di antara interval 1020 – 1260. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Subang berada dalam kategori tinngi/baik. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa mmeperjelas tujuan organisasi, menunjukkan standar kerja, menunjukkan efektivitas, mengevaluasi target dan menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai sasaran sudah baik. kinerja pemerintah dalam Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya di pemerintah daerah. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan baik pada periode berikutnya. (Abdul Halim, 2004:150-158).

4.4 Analisis Verifikatif

1. Ketarkaitan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.23
Kolerasi Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9.050	4.808		1.882	.071
	X1	.224	.103	.371	2.181	.038
	X2	.423	.174	.413	2.431	.022

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai *constant* sebesar 9.05. Nilai koefisien arah garis (b_1) untuk X_1 sebesar 0,224 dan nilai koefisien arah garis (b_2) untuk X_2 sebesar 0,423 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: $Y = 9.050 + 0{,}224X_1 + 0{,}423\ X_2$

Dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 9.050, artinya jika partisipasi penyusunan anggaran (X_1) dan system akuntansi keaungan daerah (X_2) nilainya adalah 0, maka kinerja pemerintah berarti tetap sebesar 9.050.

Koefisien regresi variabel partisipasi penyusunan anggaran $_{(X1)}$ sebesar 0,224 artinya jika variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah nilainya tetap dan partisipasi penyusunan anggaran mengalami perubahan sebesar 1 maka kinerja pemerintah daerah $_{(Y)}$ akan mengalami peningkatan sebesar 9,050 + 0,224 (1) + 0,423 (0) = 9,274. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin meningkat partisipasi penyusunan anggaran maka semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

Koefisien regresi variabel system akuntansi keuangan daerah (X_2) sebesar 0,423, artinya jika variabel partisipasi penyusunan anggaran nilainya 0 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mengalami perubahan sebesar 1 maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 9,050 + 0,224 (0) + 0,423 (1) = 9,473. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara system akuntansi keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin baik system akuntansi keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

2. Pengaruh Partisipasi penyusunan Anggaran (x1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Untuk melihat lebih rinci pengaruh partisipasi penyusunan anggaran($X_{1)}$ dengan kinerja pemerintah daerah (Y) dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23
Kolerasi Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Correlations

Control Variables			Partisipasi penyusunan Anggaran	Kinerja
pengawasan	Partisipasi Penyusunan Anggaran	Correlation	1,000	,613
		Significance (2-tailed)	.	,000
		Df	0	30
	Kinerja	Correlation	,613	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		Df	30	0

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi partisipasi penyusunan anggaran (X1) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) sebagai berikut: koefisien korelasi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah r = 0,613, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintha. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2004: 216) maka eratnya korelasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah adalah kuat karena berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799, dan arahnya positif ini berarti apabila partisipasi penyusunan anggaran meningkat maka kinerja pemerintah juga akan meningkat.

3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (x2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Untuk melihat lebih rinci pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Korelasi Antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Correlations

Control Variables			Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kinerja
Partisipasi	Sistem akuntansi keuangan daerah	Correlation	1,000	,630
		Significance (2-tailed)	.	,000
		Df	0	30
	Kinerja	Correlation	,630	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		Df	30	0

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi X2 terhadap Y sebagai berikut: koefisien korelasi antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kinerja pemerintah r = 0,630, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kinerja pemerintah. Jika diinterpretasikan menurut Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kinerja pemerintah adalah kuat karena berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799, dan arahnya positif ini berarti apabila Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat maka kinerja pemerintah akan meningkat.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan partisipasi penyusunan anggaran pada dinas Pemerintah kabupaten subang tergolong baik dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 79,38%.
2. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang tergolong dalam kategori baik dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 78,75%.
3. Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang termasuk dalam kategori baik dengan perolehan nilai persentase sebesar 78,75%.
4. Partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan (secara bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai f hitung sbesar 12,846 nilai t tabel sebesar 3,31 dan nilai signifikasnsi yang diperoleh adalah sebesar 0,00 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan total pengaruh yang diberikan partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 48,72%, yang berada diantara 0,40 – 0,599 dengan tingkat koefisien yang sedang, dan sisanya yaitu sebesar 51,28% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Factor lain disini seperti komitmen organisasi, kinerja manajerial, informasi lebih kompleks dan pertanggungjawaban.
5. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,181 nilai t hitung sebesar 2,048 dan nilai signifikansi sebesar 0,038 yang berada diantara 0,20 – 0,399 dengan tingkat koefisien yang rendah , dengan total pengaruh yang diberikan sebesar 37,57% sedangkan sisanya yaitu sebesar 62,43% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. faktor lain disini seperti keterlibatan, dan kontribusi. Partisipasi penyusunan anggaran memungkinkan kinerja pemerintah daerah para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran. Peningkatan tanggung jawab dan tantangan dalam proses tersebut memberikan insentif non uang yang mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi (Hansen dan Mowen : 2010)
6. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nila t hitung yang diperoleh sebesar 2,431 nilai t tabel 2,048 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 yang berada diantara 0,20 – 0,399 dengan tingkat koefisien yang rendah, dengan total pengaruh yang diberikan sebesar 39,69% sedangkan sisanya yaitu sebesar 60,31% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini transparansi dan akuntabilitas. Menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai jika dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam proses tingkat kinerja yang lebih tinggi Menurut (Mardiasmo 2002 : 147).

V. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Partisipasi penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Subang di secara umum sudah berada dalam kategori baik. Artinya sebagian besar kariawan dinas Pemerintah Kabupaten Subang sudah berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Tetapi namun komunikasi dalam penyusunan anggaran masih kurang serta belum semua tim anggaran yang terlibat yang ikut berpatisipasi dalam penyusunan anggaran.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang secara umum berada dalam kategori baik. Tetapi masih ada pertanyaan dalam indikator yang mendapat skore terendah dalam jawaban responden. Jadi diaharapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Dinas Pemerintah Kabupaten Subang sebaiknya ditingkatkan dalam lingkungan serta komunikasi antara atasan dan bawahan semua pegawai Dinas Pemerintah Kabupaten Subang harus saling berkomunikasi dengan baik untuk menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
3. Kinerja pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Subang berada dalam kategori sedang. Artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Subang yang belum

tercapai sesuai dengan sasaran target. Diharapkan kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Subang lebih ditingkatkan karena masih ada pembangunan yang belum terlaksana dikarenakan masih rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-target capaian kinerja pemerintah daerah.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Subang, dengan tingkat pengaruh cukup kuat. Artinya semakin meningkat Parttisipasi Penyusunan Anggaran, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan meningkat.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti bahwa Sistem akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang, dengan tingkat pengaruh cukup kuat. Artinya semakin meningkat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan meningkat.
6. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terbukti bahwa Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang, dengan tingkat pengaruh cukup kuat. Artinya semakin meningkat Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka Kinerja Pemerinta Daerah akan meningkat.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Subang maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan partisipasi penyusunan anggaran sebaiknya perusahaan mempertahankan kualitas kinerja para pegawai dalam penyusunan anggaran dengan cara selalu melakukan komunikasi antara atasan dan bawahan dalam melakukan penyusunan anggaran sehingga capaian anggaran dapat terealisasi dengan baik.
2. Tingkat Informasi terhadap karyawan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang sebaiknya dipertahankan dengan cara pimpinan salalu memonitor dan mengontrol kerja para pegawainya agar semua kerja terkontrol dengan baik.
3. Kinerja para pegawai masih perlu terus ditingkatkan lagi karena kinerja pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Subang masih belum mencapai target yang diinginkan. Untuk itu diharapkan kepada pegawai Dinas Pemerintah kabupaten Subang meningkatkan kinerjanya dalam menjamin pencapaian target perencanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Subang .
4. Sebaiknya perusahaan mempertahankan faktor penyusunan anggaran sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan cara ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga diharapkan dapat memotivasi kerja para pegawai di Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Perusahaan sebaiknya mempertahankan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan cara pimpinan selalu mengawasi dan mengontrol kinerja para pegawainya serta saling bekomunikasi satu sama lain dalam menyusun kinerja yang baik.
6. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten subang dinilai cukup. Maka dari itu perlu ditingkatkan kembali partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah agar tercipta kinerja pemerintah daerah. Dengan kedisiplinan dan kinerja yang lebih ditingkatkan dan diperbaharui. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih lengkap sangat mendukung pencapaian tata kekola pemerintahan yang baik.

VI. Daftar Pustaka

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta

Abdul Halim. 2007.*Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3.*Jakatra:Salemba Empat

Bastian, Indra.2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
Halim, A, Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Sari Bunga Rampai: Yogyakarta.*

Hansen, Don R.dan Marryane M. Mowen. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Terjemahan Deny Arnos. Salemba Empat. Jakarta.

Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE
Dhaemanegara, Ida Bagus Agung. 2010. *Penganggaran Perusahaan Teori and Aplikasi.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ihyaul Ulum. 2004. *Akuntasi sektor publik: Suatu Pengatar*. Jakarta: Bumi Aksara
Indriantoro Nur,. Supomo,Bambang, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Penerbit : BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset:Yogyakarta.

Mardiasmo.2002.2004.*Akuntansi Sektor Publik*.Andi Offset: Yogyakarta.

Indriantoro Nur,. Supomo,Bambang., 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Penerbit : BPFE Yogyakarta.

Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:
Perdana Media Group.

Lalolo Loina. *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi*. 2003. BPKP

Mardiasmo.2002.2004. *Akuntansi Sektor Publik*.Andi Offset: Yogyakarta

Narimawati,Umi., Dewi Anggadini, Sri., Ismawati Linna.,2010.*Penulisan Karya Ilmiah.*Jakarta:Penerbit Genesis
Narimawati Umi. 2008. *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi.*Yogyakarta :Penerbit Graha Ilmu.

Narimawati, Umi. 2010. *metode penelitian :Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi.* Jakarta: Penerbit Genesis.

Nordiawan, D,& Hertianti, A. 2011. *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Sinambela Poltak, Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai:Teori Pengukuran dan Implikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005

Supangat, Andi. 2007. *Statistika.*Kencana Perdana Media Group: Jakarta.

Permendagri No. 23 Tahun 2007 Tenteng Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sugiyono.2005,2007. 2010.*Metode Penelitian*.Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2008.*Metode Penelitian Bisnis.*Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D.* Alfabeta: Bandung

Undang – undang No 15 Tahun 2004. Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang – undang No 19 Tahun 2003. Tentang BUMN.

UNDP (*United Nation Development Program).*2003

Ulum, Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Katalog Dalam Terbitan (KDT) Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Undang-undang No.25 Tahun 1999.

Undang – Undang No 17 Tahun 2004.

Undang – Undang No 32 Tahun 2004.

Undang – Undang No 33 Tahun 2004

Jurnal :

Askam Tuasikal. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Vol.10. No 1. ISSN : 1410-8623

Erwati Misni. 2009. *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) terhadap kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah daerah dengan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating. Vol.102.ISSN:0854-8986*

Bambang sardjito & osmad muthaher juli 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating ASPP-07*

Wawan Sukmana & Lia Anggarsari. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya) Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009.*

Murtanto & Winda Arum Hapsari. *Pengaruh Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelola keuangan terhdap kinerja satuan pemerintah daerah (survey kabupaten Maluku) Jurnal ISSN 1410-8623*

Petrus Peleng Roreng & Mika Mallisa. *Menuju Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah yang baru pada bagian keuangan penmerintah daerah Fakultas Ekonomi Universitas Negri Malang*

Agus Widarsono. *Implementasi sistem akuntansi Keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah terhadap pengawasan dan kinerja pemerintah daerah . Jurnal Akuntansi dan bisnis Vol, 9 no 1 Febuari 2009 21*

MEDIATY . *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi Tahun XX, No. 3 Desember 2010.*

Nur Paizzah & Titik Mildawati *Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) terhdap kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD pemerintah daerah dengan komitmen organisasi dan gaya kepeminpinan sebagai variable moderating (survey aparetur pemerintah kota jambi)* ISSN-0854.

Ardiani Ika S. Dian Triyani Anik Puji Lestari . *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Angggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi Dan Pelimpahan Wewenang.*